



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA JAMBI



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
2023



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Tahun 2022 ini dapat tersusun. Penyusunan LKjIP merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Bappeda Kota Jambi atas penggunaan anggaran di tahun 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan LKjIP Bappeda Kota Jambi adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kota Jambi ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Bappeda Kota

Jambi dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi  
perkembangandan pembangunan daerah di Kota Jambi

Jambi, Januari 2022  
Kepala Bappeda Kota Jambi



**SUHENDRI, SH, M. Si**  
NIP.19700404 199601 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

## **1.2. Struktur Organisasi dan Kelembagaan**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Jambi Tahun 2018 – 2023;

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 42).

### **1.2.1 Kedudukan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2.2. Tugas**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

### **1.2.3. Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- d. tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- 3. Sub Koordinator Program Dan Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari;

- 1. Sub Koordinator Perencanaan Dan Pendanaan Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2. Sub Koordinator Data Dan Informasi Dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Dan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari;

- 1. Sub Koordinator Pemerintahan Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2. Sub Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 3. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur terdiri dari;

- 1. Sub Koordinator Perekonomian Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2. Sub Koordinator LH dan SDA Dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

3. Sub Koordinator Infrastruktur Dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Sub Koordinator Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Sub Koordinator Penelitian Dan Pengembangan Perekonomian, SDA Dan Infrastruktur Dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Sub Koordinator Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Dan Kelompok Jabatan Fungsional.



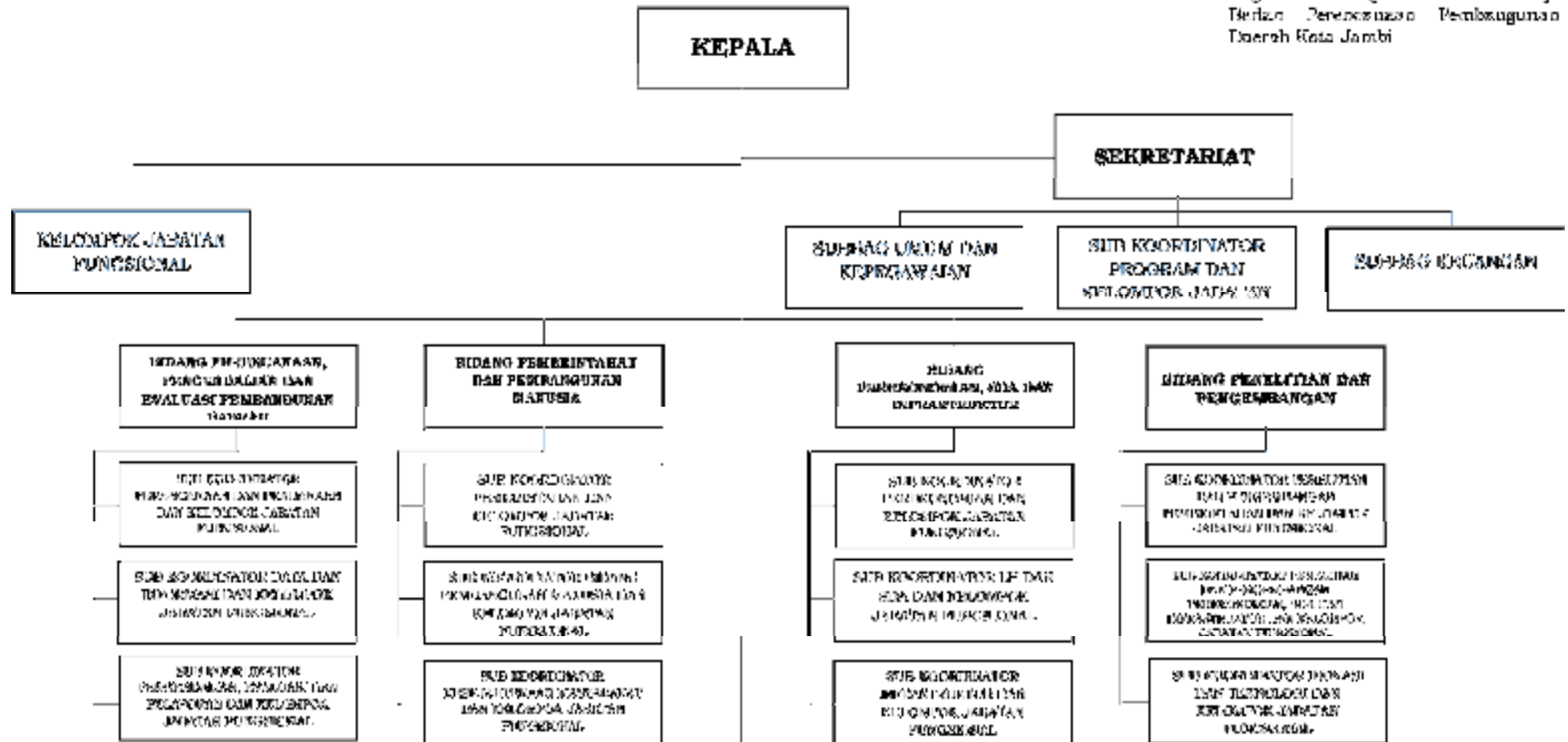
**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

Nomor : 42 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Rentang: Kedudukan: Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Jambi



### **1.3. Aspek Strategis**

Bappeda sebagai perangkat daerah utama di lingkup Pemerintah Kota Jambi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pencapaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai perangkat daerah yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen Bappeda Kota Jambi untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Jambi, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.

### **1.4. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS**

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh sebagai basis data perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
3. Masih terdapat perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam penyusunan dokumen perencanaan

4. Belum optimalnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah
2. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

## **1.5. ASPEK KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima			
Misi 1 : “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM dan RTRW	Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan
		Memperkuat pemahaman OPD terkait perencanaan	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
		Memberdayakan SDM perencana untuk menghasilkan perencanaan yang integratif	Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang

	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan peranan Bappeda dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran	SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan
		Memfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha	Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
		Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik	Peningkatan hasil evaluasi RKPD
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
			Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
			Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait

		Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk Meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Membuka Forum kelitbangan guna menjangkau masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan
--	--	---	---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan

sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

### 2.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan dan indikator tujuan Bappeda mengacu pada dokumen Renstra tahun 2018 – 2023, sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) indikator tujuan yakni:

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Dihitung dari capaian nilai komponen perencanaan pada SAKIP ditambah nilai pengukuran kinerja pada SAKIP	Nilai	37,60	37,91	38,22	38,63	39,04

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Bappeda mampu urusan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Bappeda mendukung pencapaian 1 (satu) misi Kota Jambi yang tercantum pada RPJMD Tahun 2018-20231 yaitu Misi 1 “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”.



Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 4 (empat) indikator.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja utama Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Target 2022
1.	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	22,43
2.	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	16,20
3.	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%	100%
4.	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Dokumen penetapan kinerja yang telah disusun merupakan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Walikota Jambi sebagai pihak ke-dua selaku pemberi amanah.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Kepala Bappeda tahun 2022 meliputi 3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan

melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Jambi yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Walikota Jambi sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHENDRI, SH., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jabatan : Walikota Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2022

PIHAK KEDUA

**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.**

PIHAK PERTAMA

**SUHENDRI, SH., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700404 199601 1 002**

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH KOTA JAMBI  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22,43
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	16,20
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	%	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.342.161.253,00	APBDP
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264,00	APBDP
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.211.019.387,00	APBDP
4	Penelitian dan Pengembangan Daerah	683.358.616,00	APBDP
TOTAL		<b>12.357.838.520,00</b>	APBDP

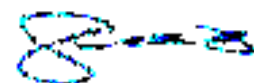
Jambi, November 2022

PIHAK KEDUA



**Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.**

PIHAK PERTAMA



**SUHENDRI, SH., M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19700404 199601 1 002

Sedangkan alokasi anggaran pencapaian kinerja Bappeda Tahun 2022 per tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5. Alokasi Anggaran Bappeda per Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Persentase
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	10.553.180.640	85,40
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	1.121.299.264	9,07
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	683.358.616	5,53
Jumlah		12.357.838.520	

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Perhitungan persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

No.	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Selanjutnya, Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.2. Kategori Nilai Capaian Kinerja

No.	Rata-rata Capaian	Kategori
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Realisasi Indikator Kinerja Utama
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,36*	99,69%*
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,2	16,10*	99,38%*
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	108,17%**	108,17%**
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 3. 4. Rekapitulasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	N/A	21,85	22,23	22,36	22,36*
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	N/A	15,75	16,04	16,10	16,10*
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	N/A	123,25 %	123,25 %	100,91%	108,17 %**
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	N/A	N/A	100%	100%	100%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Tabel 3. 5. Rekapitulasi Capaian Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,36*	99,69*
2		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,20	16,10*	99,38*
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>99,53*</b>
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	108,17%**	108,17%**
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>108,17%**</b>
4	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Tabel 3. 6. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Bappeda Kota Jambi Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	≤50%	51≤65%	66≤75%	76≤90%	91≤100 %
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	2	99,53*					Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	1	108,17% **					Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	1	100%					Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>						

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka kinerja capaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja  $91\% \leq 100\%$  kategori “sangat tinggi” sebanyak 4 sasaran, atau 100%
- b. Capaian kinerja  $76\% \leq 90\%$  kategori “tinggi” sebanyak 0 sasaran, atau 0%;
- c. Capaian kinerja  $66\% \leq 75\%$  kategori “sedang” sebanyak 0 sasaran, atau 0%;
- d. Capaian kinerja  $51\% \leq 65\%$  kategori “rendah” sebanyak 0 sasaran, atau 0% ; dan
- e. Capaian kinerja  $\leq 50\%$  kategori “Sangat Rendah” sebanyak 0 sasaran, atau 0%

Pencapaian kinerja 3 sasaran tersebut, dengan indikator kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikelompokkan sesuai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 7. Peringkat Nilai Capaian Indikator Kinerja

No	Peringkat Kinerja	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	3	4
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-
Jumlah		3	4

### 3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.8. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2022

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,36*	99,69*
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,2	16,10*	99,38*
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	108,17%**	108,17%**
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran

**Pada Sasaran 1** yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 22,43, penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

Adapun hasil masih mengacu pada penilaian tahun 2021 yaitu sebesar 22,36. Untuk penilaian tahun 2022 masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 15,90, penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%.

Adapun hasil masih mengacu pada penilaian tahun 2021 yaitu sebesar 16,10. Untuk penilaian tahun 2022 masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

Pencapaian hasil capaian **Sasaran 1** pada tahun 2022 erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah yang masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.



Gambar 3.1. Penghargaan secara virtual SAKIP dan RB Award 2021

**Pada Sasaran 2** yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%.

Hasil Capaian Indikator Sasaran sampai saat ini adalah 108,17%. Dari 34 Indikator Sasaran pada RPJMD, sampai saat ini terdapat 16 Indikator Sasaran yang telah di rilis atau dipublikasikan.

Adapun Indikator Sasaran yang realisasi capaiannya melebihi 100% adalah : Nilai SAKIP sebesar 100%, Indeks Pelayanan Publik sebesar 105,38%, Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan sebesar 108,69%, Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan sebesar 100,73%, Indeks Kualitas Air sebesar 106,52%, Indeks Kualitas Udara sebesar 109,08%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 111,25%, Tingkat

Pengangguran Terbuka sebesar 106,77%, Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 100,24%, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 100%, Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 100%.

**Pada Sasaran 3** yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 100%.



Gambar 3.2. Kota Jambi meraih penghargaan sebagai "Kota Terinovatif" dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2022



Gambar 3.3. Kota Jambi meraih Juara 1 Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022



Gambar 3.4. Bappeda Kota Jambi meraih Peringkat 4 Lomba Inovasi Award 2022 Tingkat Kota Jambi kategori Tata Kelola Pemerintahan atas Inovasi E-BABE (Elektronik Pelaporan Bangkit Berdaya)

Tabel 3.9. Hasil rekomendasi kajian Tahun 2022

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	TURUNAN
1	Kajian Rencana Induk Kelitbangan	CV. Pratama Consultan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rencana Induk Kelitbangan ini memuat arah kebijakan kelitbangan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang diemban oleh perangkat litbang daerah serta indikator-indikatornya</li> <li>❖ Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat. Salah satu yang harus ditindaklanjuti yaitu pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan kelitbangan yang meliputi Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Sekretariat Tim Pengendali Mutu, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang pada Tim Kelitbangan.</li> <li>❖ Melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya berupa Forum kelitbangan.</li> <li>❖ Memperkuat kerjasama eksisting dengan empat pihak lainnya yaitu K/L kelitbangan, lembaga kelitbangan provinsi/pemerintah daerah lain, lembaga kelitbangan non pemerintah serta komunitas dan masyarakat. Diharapkan dengan kerjasama ini, dapat tercipta optimalisasi kualitas dan kuantitas kelitbangan.</li> <li>❖ Hasil evaluasi kondisi eksisting lainnya adalah adanya inovasi maupun kajian dari Perangkat Daerah di</li> </ul>	Penelitian dan Pengembangan	Rancangan RKPD 2024



NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	TURUNAN
			<p>Pemerintah Kota Jambi yang belum melalui proses kelitbangan. Dalam beberapa kegiatan, hal ini kemudian berdampak pada perbedaan standar kualitas kajian kelitbangan di pemkot Jambi dan optimalisasi pemanfaatan inovasi daerah karena terkait dengan urgensi yang sebenarnya dapat dikaji melalui proses kelitbangan.</p>		
2	Kajian Indeks Pembangunan Pemuda Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agus Slamet Nugroho, S.Sos., M.I.Kom</li> <li>2. Syaeful Muslih, S.Si</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persoalan pada setiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain, sehingga memerlukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor (KSLs).</li> <li>2. Perlunya pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kota Jambi yang bertugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.</li> <li>3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan Kota Jambi.</li> <li>4. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan stakeholder kunci pengampu pembangunan bidang pemuda.</li> <li>5. Revitalisasi sarana-prasarana yang mendukung pembangunan kepemudaan.</li> <li>6. Pendekatan siklus hidup dalam pembangunan pemuda, sehingga pembangunan pemuda yang dilakukan tidak parsial.</li> </ol>	<p>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</p>	<p>Rancangan RKPD 2024</p>

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	TURUNAN
3	Kajian Model Hunian Vertikal Untuk Pemenuhan Kebutuhan Perumahan di Kota Jambi	1. Doni Patria, ST., M.Si 2. M. Akbar Zulkarnain Zubaidi, ST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk tindak lanjut dari kajian ini perlu disusun serangkaian dokumen pendukung seperti Dokumen Studi Kelayakan, Masterplan, DED dan Dokumen Lingkungan agar dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan seperti yang diharapkan.</li> <li>2. Didalam perencanaan dan pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung agar gedung hunian vertikal yang dibangun terhindar dari kegagalan konstruksi serta menjamin keselamatan penghuni gedung.</li> <li>3. Perlu kolaborasi semua pihak baik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan beroperasinya hunian vertikal, karena diharapkan hunian vertikal ini dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Kota Jambi sambil melakukan penataan terhadap kawasan permukiman di Kota Jambi ke depannya terutama penataan terhadap kawasan permukiman kumuh serta permukiman yang berada dibantaran sungai yang masuk dalam kawasan sempadan sungai.</li> <li>4. Dari hasil kajian Perumahan Guru Mayang Mangurai bias dijadikan Pilot Project bagi Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan Hunian Vertikal di Kota Jambi dengan memperhatikan kriteria lokasi serta tanah dan lahan yang ada.</li> </ol>	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rancangan RKPD 2024

NO	KAJIAN	TENAGA AHLI	REKOMENDASI	URUSAN	TURUNAN
4	Kajian Strategi Penataan dan Pengembangan UMKM melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dedi Saputra, S.E., M.E</li> <li>2. Henny Nurafni, S.E</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya Kolaborasi dari berbagai OPD terkait penataan dan pengembangan koperasi dan UMKM Kota Jambi</li> <li>2. Penyediaan gerai atau stand oleh-oleh sebagai pilot project di tempat strategi wisata alam Danau Sipin yang sudah berkembang menjadi tempat wisata hiburan, wisata kuliner dan lain-lain untuk UMKM yang punya produk unggulan</li> <li>3. Memberikan kemudahan dalam perizinan Kemudahan pendirian koperasi, SKU, PIRT, BPOM dan Label Halal untuk produk UMKM dibawah naungan koperasi yang merupakan binaan DTKK Kota Jambi, sistem perizinan dengan sistem online</li> <li>4. Disarankan semua UMKM dibawah naungan DTKK Kota Jambi, Koperasi dan UMKM untuk menjadi anggota koperasi.</li> </ol>	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Rancangan RKPD 2024

## **2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Pada tahun 2022 pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mencakup penilaian tingkat pencapaian target (dari rencana tingkat capaian), Program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perumusan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dengan mempertimbangkan indikator masukan, indikator keluaran dan indikator hasil, sedangkan indikator manfaat dan indikator dampak belum digunakan dikarenakan belum adanya sistem pengumpulan data kinerja yang belum memadai serta adanya beberapa kendala dalam pengukuran kegiatan-kegiatan pada tahap manfaat maupun tahap dampak. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.10. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2018 s.d 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018			2019			2020			2021			2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	21,85	21,85	100%	22,01	22,23	100,99%	22,17	22,36	100,85%	22,43	22,36*	100,85%*
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	15,75	15,75	100%	15,90	16,04	100,88%	16,05	16,10	100,31%	16,20	16,10*	100,31%*
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	123,25%	123,25%	100%	123,25%	123,25%	100%	100,91%	100,91%	100%	108,17%**	108,17%**
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI I	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	21,85	21,85	22,01	22,23	22,17	22,36	22,43	22,36*	22,64	-
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	15,75	15,75	15,90	16,04	16,05	16,10	16,20	16,10*	16,40	-
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	100%	123,25%	100%	123,25%	100%	100,91%	100%	108,17%**	100%	-
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023 maka, untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal.

Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Didalam RPJMD 2018-2023 BAPPEDA Kota Jambi mengacu pada sasaran RPJMD meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Berbasis TIK dengan indikator Sasaran Nilai SAKIP. Capaian Sasaran RPJMD yang berkaitan dengan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.12. Keterkaitan Urusan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Sasaran Hasil Pembangunan									
						2019		2020		2021		2022		2023	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informas	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	B	B	BB	B	BB	B	BB	-	BB	-

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional**

Mengingat Bappeda tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian ini karena Bappeda selaku sebuah institusi didukung oleh :

1. Komitmen kepala Badan yang kuat untuk membenahan manajemen Bappeda;
2. Komitmen seluruh personil Bappeda untuk meningkatkan kinerja;
3. Integritas dan loyalitas pegawai Bappeda yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
4. Kapasitas dan kompetensi personel Bappeda yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
5. Tingkat disiplin dari pegawai Bappeda.

Walaupun demikian Bappeda juga mengakui masih lemahnya koordinasi dalam beberapa bidang yang dilakukan dan ini merupakan tugas perbaikan di masa yang akan datang.

#### **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Bappeda Kota Jambi mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran serta 4 indikator sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran, utamanya Belanja Langsung, dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap capaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.13. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah di capai**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,43	22,36*	99,69*	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.553.180.640	8.754.170.593	82,95%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,2	16,10*	99,38*	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	108,17%**	108,17%**	3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.121.299.264	945.473.911	84,32%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100	4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	683.358.616	630.557.656	92,27%
Rata-rata capaian kinerja					101,81	Jumlah			86,51
					<b>Efisiensi</b>				15,3%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda, yaitu sebesar 15,3%.

## **7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 sebagai berikut :

### **A. Program Non Urusan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **B. Program Urusan Perencanaan**

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

### **C. Program Urusan Penelitian dan Pengembangan**

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

### **D. Kegiatan Bappeda Kota Jambi untuk Tahun 2022 yaitu :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
10. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
13. Koordinasi Perencanaan Bidang Pererkenomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
14. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
15. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
17. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
18. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

E. Sub Kegiatan Bappeda Kota Jambi untuk Tahun 2022 yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
7. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
8. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
18. Fasilitasi Kunjungan Tamu
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
29. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

33. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
34. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
35. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
36. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
37. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
38. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
39. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
40. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)
41. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
42. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
43. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
44. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
45. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
46. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
47. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
48. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

49. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
51. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
52. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
53. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
54. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.14. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022**

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
								Rp	%				
1	BAPPEDA	1. Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	'Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	9.342.161.253	100%	7.732.639.645	82,77	100		
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP	84 Nilai	364.172.869	Menunggu hasil penilaian dari Inspektorat	245.514.869	67,42	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	61.831.699	6 dokumen	57.573.699	93,11	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021		
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik						
							Rp	%						
		4	Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	302.341.170	3 dokumen	187.941.170	62,16	100	Penyediaan dana untuk honorarium penulisan pidato disesuaikan dengan permintaan pidato	- SILPA - Penyesuaian dengan permintaan pidato	
		5	Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.965.291.555	100%	4.485.414.328	90,34	100			

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
		6 Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 ASN	4.531.759.355	37 ASN	4.116.799.678	90,84	100		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen								
				- Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	12 Dokumen dan 26 Orang	390.040.100	12 Dokumen dan 26 Orang	332.835.850	85,33	100		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	19.998.850	2 Dokumen	18.892.700	80,42	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	23.493.250	12 Laporan	40.853.800	75,61	100		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	100%	54.034.300	100%	40.853.800	75,61	100		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Jenis BMD	49.106.700	6 Jenis BMD	38.104.200	77,59	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
							Rp	%					
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	4.927.600	13 Laporan	2.749.600	55,79	100	Penyediaan dana untuk bahan cetak disesuaikan dengan kebutuhan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	504.257.800	100%	271.669.428	53,8	100			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	140 Stel	159.390.000	140 Stel	151.630.600	95,13	100			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	76.567.800	3 Dokumen	56.862.200	74,26	100			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	144.500.000	37 Orang	9.996.800	6,91	100	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan undangan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target			Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
							Rp	%					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	8 Orang/Kali	123.800.000	8 Orang/Kali	53.179.828	42,96	100	Pelaksanaan Bimbingan Teknis disesuaikan dengan undangan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>TERTIB ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	100%	1.839.032.497	100%	1.594.743.499	86,71	100			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	81.764.889	1 Paket	81.739.750	99,97	100			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Tahun	861.227.881	1 Tahun	752.011.294	85,34	100			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	234.006.987	6 Paket	233.508.144	99,79	100			

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	58.985.300	1 Paket	53.985.800	91,52	100		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Tahun	16.876.000	1 Tahun	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan.	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	37.882.700	1 Laporan	20.967.700	55,35	100	Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Jumlah kunjungan tamu	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	499.945.400	1 Laporan	419.187.671	83,85	100		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1 Tahun	48.343.340	1 Tahun		<b>68,97</b>	<b>100</b>	Adanya sisa honorarium pengelola arsip	- SILPA -Merencanakan pengalokasian

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target			Realisasi			Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
								Rp	%			
				Arsip Dinamis pada SKPD				33.343.140				dana untuk tahun berikutnya lebih baik
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>440.317.030</b>	<b>100%</b>	<b>210.783.930</b>	47,87	100		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	6 Jenis	440.317.030	6 Jenis	<b>210.783.930</b>	47,87	<b>100</b>	Pengadaan Sarana dan prasarana yang di anggarkan terkendala perbedaan spesifikasi yang dibutuhkan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>559.912.400</b>	<b>100%</b>	<b>426.414.187</b>	76,16	100		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35.014.800	1 Laporan	9.580.000	55,92	100	Penyediaan dana untuk administrasi materai dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik



No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi			Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Komunikasi	100 Mbps 20000 KWH 50M3	292.000.000	100 Mbps 20000 KWH 50M3	235.196.987	80,55	100		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	40.218.000	40,22	100	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	1 Tahun	132.897.600	1 Tahun	131.419.200	<b>98,89</b>	<b>100</b>		
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>615.142.802</b>	<b>100%</b>	<b>457.245.604</b>	74,33	100		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	22 unit	239.390.000	22 unit	196.732.411	82,18	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target			Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
							Rp	%					
			Dinas Jabatan	dipelihara dan dibayarkan pajaknya									
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	51.350.000	8 Unit	49.019.600	95,46	100			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	30 Unit	59.920.000	30 Unit	59.538.000	99,36	100			
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	125.496.400	83,66	100			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	99.982.802	1 Tahun	21.959.193	21,96	100	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor sesuai dengan kebutuhan	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Pemeliharaan/	1 Tahun	14.500.000	1 Tahun	4.500.000	<b>31,03</b>	<b>100</b>	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	- SILPA -Merencanakan	

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target			Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan		Kinerja	Keuangan	Fisik				
								Rp	%				
			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor							prasarana gedung kantor sesuai dengan kebutuhan	pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- NILAI SAKIP KOMPONEN PERENCANAAN - PENGUKURAN KINERJA	- 25,16 - 16,28	1.211.019.387	Menunggu hasil penilaian dari Inspektorat	1.021.530.948	84,35	100			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembnagunan Manusia	100%	494.407.429	100%	472.354.413	95,54	100			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	2 Dokumen	91.799.929	2 Dokumen	78.603.223	85,62	100			

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
				RKPD)								
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	402.607.500	4 Dokumen	393.751.190	97,80	100		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perencanaan dan SDA	22,33	406.581.775	Menunggu hasil penilaian dari Inspektorat	324.537.171	79,82	100		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perencanaan dan SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	2 Dokumen	107.506.427	2 Dokumen	73.452.840	68,32	100	Pengadaan Makan minum rapat yang di anggarkan terkendala Dampak pandemi covid-19 sehingga beberapa rapat dilakukan secara	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
							Rp	%					
				a (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)						online			
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 OPD	20.664.767	6 OPD	13.238.220	64,06	100	Perjalanan dinas Dalam daerah terkendala Banyaknya undangan yang bersamaan dengan rapat-rapat teknis dan OPD terkait	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	74.454.091	5 Dokumen	50.673.459	68,06	100	Pengadaan Makan minum rapat yang di anggarkan terkendala Dampak pandemi covid-19 sehingga beberapa rapat dilakukan secara online	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	2 OPD	203.956.490	2 OPD	187.172.652	91,77	100			

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA								
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Nilai Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	20,54	310.030.183	Menunggu hasil penilaian dari Inspektorat	224.639.364	72,46	100		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 Dokumen	204.097.326	3 Dokumen	164.206.507	80,46	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target			Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik					
								Rp	%				
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 OPD	105.932.857	5 OPD	60.432.857	57,05	100	Perjalanan dinas Dalam daerah terkendala Banyak nya undangan yang bersamaan dengan rapat-rapat teknis dan OPD terkait	- SILPA -Merencanakan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya lebih baik	
		1 SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan	3 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	1.121.299.264	100%	945.473.911	84,32	100			
		2 Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	608.387.187	6 Dokumen	539.074.996	88,61	100			

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
		3 Peningkatan hasil evaluasi RKPD	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	268.780.287	2 kali	255.480.287	95,05	100		
		4 Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP JPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	339.606.900	6 Dokumen	283.594.709	83,51	100		
		5 Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Akurasi Data Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>257.731.865</b>	<b>100%</b>	<b>195.252.139</b>	<b>75,76</b>	<b>100</b>		
		6 Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan	2 Masukan	30.074.950	72,32%	21.749.950	72,32	100		



No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
		spasial		daerah								
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	39 Orang	136.210.040	39 Orang	94.661.814	69,50	100		
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	91.446.875	1 Buku	78.840.375	86,21	100		
			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	<b>92%%</b>	<b>255.180.212</b>	<b>100%%</b>	<b>211.146.776</b>	<b>82,74</b>	<b>100</b>		
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Kali	85.924.962	2 kali	66.475.224	77,36	100		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen 4 triwulan 39 OPD	169.255.250	4 Dokumen 4 triwulan 39 OPD	144.671.552	85,48	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
		1 Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait	4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kajian yang Direkomendasikan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	100%	683.358.616	100%	630.557.656	92,27	100		
		2 Membuka Forum kelitbangan guna menjangkau masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	100%	253.915.385	100%	236.989.146	93,33	100		
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi	2 Laporan	152.565.385	2 Laporan	135.794.646	89,01	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
				Birokrasi								
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	101.350.000,0	1 Dokumen	101.194.500	99,85	100		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian bidang sosial budaya dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah	100%	48.914.630	100%	46.974.200	96,03	100		
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	47.825.900	1 Dokumen	45.885.900	95,94	100		
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1.088.730	10%	1.088.300	99,96	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah	100%	96.488.000	100%	90.638.000	93,94	100		
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	47.213.000	1 Dokumen	44.213.000	93,65	100		
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	49.275.000	1 Dokumen	46.425.000	94,22	100		
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah	58-63	284.040.601	62,22	255.956.310	90,11	100		
			Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Jumlah FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan	5 Kali	75.887.180	5 Kali	56.725.436	74,75	100		

No	OPD	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Menangani Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2021
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Fisik				
							Rp	%				
			Inovasi	Sistem Inovasi Daerah								
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	208.153.421	2 Laporan	199.230.874	95,71	100		

### **3.4. Akuntabilitas Keuangan**

#### **3.4.1. Realisasi Anggaran**

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Jambi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja BAPPEDA Kota Jambi dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada tabel sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAPORAN**  
**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022 DAN 2021**

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.357.838.520,00</b>	<b>10.330.202.160,00</b>	<b>83,59</b>	<b>8.783.310.976,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.214.299.209,00</b>	<b>9.436.343.436,00</b>	<b>84,15</b>	<b>8.285.747.976,00</b>
<b>2.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.757.828.355,00</b>	<b>4.330.391.678,00</b>	<b>91,02</b>	<b>4.315.948.526,00</b>
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.079.705,00	2.595.118.481,00	93,68	2.639.579.886,00
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.000.349.600,00	1.861.400.500,00	93,05	1.892.573.200,00
2.1.01.01.01.00 01.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.000.349.600,00	1.861.400.500,00	93,05	1.892.573.200,00
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	187.405.624,00	181.887.415,00	97,06	196.849.220,00
2.1.01.01.02.00 01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	187.405.624,00	181.887.415,00	97,06	196.849.220,00
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.539.000,00	135.430.000,00	93,70	213.730.000,00
2.1.01.01.03.00 01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	144.539.000,00	135.430.000,00	93,70	213.730.000,00
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.110.000,00	70.600.000,00	99,28	11.200.000,00
2.1.01.01.04.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.110.000,00	70.600.000,00	99,28	11.200.000,00
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.617.000,00	41.670.000,00	97,78	38.565.000,00
2.1.01.01.05.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.617.000,00	41.670.000,00	97,78	38.565.000,00
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.100.520,00	110.657.760,00	97,84	117.899.760,00
2.1.01.01.06.00 01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.100.520,00	110.657.760,00	97,84	117.899.760,00
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan KhususASN	1.785.000,00	1.543.148,00	86,45	1.885.875,00
2.1.01.01.07.00 01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.785.000,00	1.543.148,00	86,45	1.885.875,00
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.027,00	28.624,00	95,33	25.724,00
2.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.027,00	28.624,00	95,33	25.724,00
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.437.280,00	176.554.787,00	92,23	151.365.668,00
2.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	191.437.280,00	176.554.787,00	92,23	151.365.668,00
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan KerjaASN	4.426.660,00	3.836.526,00	86,67	3.871.296,00
2.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.426.660,00	3.836.526,00	86,67	3.871.296,00
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.278.994,00	11.509.721,00	86,68	11.614.143,00
2.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.278.994,00	11.509.721,00	86,68	11.614.143,00
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.761.679.650,00	1.521.681.197,00	86,38	1.453.168.640,00
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkanBeban Kerja ASN	1.761.679.650,00	1.521.681.197,00	86,38	1.453.168.640,00
2.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.761.679.650,00	1.521.681.197,00	86,38	1.453.168.640,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.069.000,00	213.592.000,00	94,48	223.200.000,00
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	206.869.000,00	194.392.000,00	93,97	204.000.000,00
2.1.01.03.07.00 01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	198.709.000,00	186.232.000,00	93,72	195.640.000,00
2.1.01.03.07.00 02.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	200.000,00
2.1.01.03.07.00 03.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
2.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00
2.1.01.03.08.00 02.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	19.200.000,00
<b>2.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.456.470.854,00</b>	<b>5.105.951.758,00</b>	<b>79,08</b>	<b>3.969.799.450,00</b>
2.1.02.01.	Belanja Barang	2.172.640.852,00	1.756.678.356,00	80,85	1.387.622.814,00
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.172.640.852,00	1.756.678.356,00	80,85	1.387.622.814,00
2.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	266.740.000,00	224.379.211,00	84,12	245.482.344,00
2.1.02.01.01.00 09.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	2.497.000,00
2.1.02.01.01.00 12.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	12.735.000,00
2.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.334.348,00	119.085.761,00	98,96	123.451.510,00
2.1.02.01.01.00 25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	143.049.430,00	142.662.090,00	99,73	119.815.630,00
2.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	430.736.553,00	375.202.545,00	87,11	368.562.338,00
2.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.900.000,00	15.750.000,00	71,92	13.059.000,00
2.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	130.219.732,00	127.021.599,00	97,54	78.670.297,00
2.1.02.01.01.00 30.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	187.614.900,00	92.088.800,00	49,08	56.145.225,00
2.1.02.01.01.00 31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	95.269.689,00	95.244.550,00	99,97	55.308.800,00
2.1.02.01.01.00 35.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	57.317.700,00	57.317.700,00	100,00	49.445.000,00
2.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.751.000,00	13.751.000,00	100,00	15.560.670,00
2.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	526.152.500,00	339.294.500,00	64,49	192.930.000,00
2.1.02.01.01.00 53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.165.000,00	3.250.000,00	16,12	5.065.000,00
2.1.02.01.01.00 63.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	105.000.000,00	102.630.600,00	97,74	-
2.1.02.01.01.00 73.	Belanja Pakaian KORPRI	54.390.000,00	49.000.000,00	90,09	-
2.1.02.01.01.00 75.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	48.895.000,00
2.1.02.02.	Belanja Jasa	2.151.687.800,00	1.830.026.790,00	85,05	1.834.030.414,00
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.823.084.000,00	1.554.313.787,00	85,26	1.472.223.914,00



<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.050.000,00	52.500.000,00	77,15	14.900.000,00
2.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	351.400.000,00
2.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.600.000,00	24.600.000,00	96,09	-
2.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	30.000.000,00	15.000.000,00	50,00	-
2.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	793.404.000,00	650.644.000,00	82,01	595.564.000,00
2.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	71.634.000,00	52.034.000,00	72,64	72.768.000,00
2.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	273.000.000,00	273.000.000,00	100,00	114.000.000,00
2.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	94.800.000,00	94.800.000,00	100,00	86.250.000,00
2.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.866.000,00	15.866.000,00	100,00	15.816.000,00
2.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	2.600.000,00
2.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.000.000,00	-	-	-
2.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	87.000.000,00	78.500.000,00	90,23	30.750.000,00
2.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000,00	14.050.545,00	58,54	-
2.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	13.000.000,00	8.810.250,00	67,77	5.858.225,00
2.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	180.000.000,00	165.949.455,00	92,19	141.772.689,00
2.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.930.000,00	-	-	-
2.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.000.000,00	23.472.050,00	48,90	23.506.000,00
2.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	-	-	-
2.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	23.000.000,00	22.914.687,00	99,63	-
2.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.000.000,00	21.372.800,00	89,05	17.039.000,00
2.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.603.800,00	-	-	5.359.200,00
2.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerjabagi Non ASN	7.603.800,00	-	-	5.359.200,00
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	102.000.000,00	100.750.000,00	98,77	-
2.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	102.000.000,00	100.750.000,00	98,77	-
2.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	68.194.500,00
2.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
2.1.02.02.08.0034.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	-	-	-	68.194.500,00
2.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	147.963.000,00	98,64	288.252.800,00
2.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00	48.118.500,00	96,24	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.02.09.00 12.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	288.252.800,00
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	64.000.000,00	22.000.003,00	34,38	-
2.1.02.02.12.00 03.	Belanja Bimbingan Teknis	64.000.000,00	22.000.003,00	34,38	-
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	424.402.802,00	251.711.593,00	59,31	283.466.269,00
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.420.000,00	104.256.000,00	59,77	79.506.000,00
2.1.02.03.02.00 34.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	100.000.000,00	40.218.000,00	40,22	-
2.1.02.03.02.01 17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.500.000,00	4.500.000,00	31,03	21.000.000,00
2.1.02.03.02.01 21.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-AlatPendingin	-	-	-	19.615.000,00
2.1.02.03.02.01 23.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.460.000,00	21.458.000,00	99,99	20.941.000,00
2.1.02.03.02.04 05.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	21.830.000,00	99,68	7.000.000,00
2.1.02.03.02.04 11.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.560.000,00	16.250.000,00	98,13	10.950.000,00
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung danBangunan	249.982.802,00	147.455.593,00	58,99	203.960.269,00
2.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.982.802,00	21.959.193,00	21,96	125.963.579,00
2.1.02.03.03.00 25.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	-	-	-	68.492.690,00
2.1.02.03.03.00 36.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	150.000.000,00	125.496.400,00	83,66	9.504.000,00
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	1.667.739.400,00	1.227.535.019,00	73,60	434.679.953,00
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.667.739.400,00	1.227.535.019,00	73,60	434.679.953,00
2.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.293.959.400,00	979.940.763,00	75,73	276.399.953,00
2.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	361.650.000,00	238.650.000,00	65,99	158.280.000,00
2.1.02.04.01.00 04.	Belanja Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota	12.130.000,00	8.944.256,00	73,74	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00
2.1.02.05.01.00 01.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.143.539.311,00</b>	<b>893.858.724,00</b>	<b>78,17</b>	<b>497.563.000,00</b>
<b>2.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.131.593.311,00</b>	<b>893.858.724,00</b>	<b>78,99</b>	<b>335.350.000,00</b>
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	-
2.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	-
2.2.02.01.03.00 05.	Belanja Modal Pompa	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00	-
2.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00	-
2.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00	-
2.2.02.03.01.00 10.	Belanja Modal Alat Bengkel BermesinLainnya	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00	-
2.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	653.452.430,00	501.274.430,00	76,71	55.900.000,00
2.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	436.660.000,00	288.600.000,00	66,09	55.900.000,00
2.2.02.05.01.00 05.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	436.660.000,00	288.600.000,00	66,09	55.900.000,00
2.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	216.792.430,00	212.674.430,00	98,10	-
2.2.02.05.02.00 03.	Belanja Modal Alat Pembersih	5.342.430,00	5.342.430,00	100,00	-
2.2.02.05.02.00 04.	Belanja Modal Alat Pendingin	86.580.000,00	85.500.000,00	98,75	-
2.2.02.05.02.00 06.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	113.870.000,00	110.832.000,00	97,33	-
2.2.02.05.02.00 07.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, danPemancar	227.716.000,00	186.910.000,00	82,08	9.950.000,00
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	194.416.000,00	153.910.000,00	79,17	9.950.000,00
2.2.02.06.01.00 06.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	194.416.000,00	153.910.000,00	79,17	9.950.000,00
2.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	33.300.000,00	33.000.000,00	99,10	-
2.2.02.06.02.00 09.	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital danKonvensional	33.300.000,00	33.000.000,00	99,10	-
2.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.999.700,00	2.999.700,00	100,00	-
2.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.999.700,00	2.999.700,00	100,00	-
2.2.02.07.02.00 05.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.999.700,00	2.999.700,00	100,00	-
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	236.100.181,00	191.349.594,00	81,05	269.500.000,00
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	122.200.909,00	98.080.000,00	80,26	160.500.000,00
2.2.02.10.01.00 02.	Belanja Modal Personal Computer	39.960.000,00	33.180.000,00	83,03	70.500.000,00
2.2.02.10.01.00 03.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	82.240.909,00	64.900.000,00	78,91	90.000.000,00
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	113.899.272,00	93.269.594,00	81,89	109.000.000,00
2.2.02.10.02.00 05.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	113.899.272,00	93.269.594,00	81,89	109.000.000,00
<b>2.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.213.000,00</b>
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-	162.213.000,00

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi2021</b>
1	2	3	4	5	6
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerja	-	-	-	162.213.000,00
2.2.03.01.01.00 01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	162.213.000,00
<b>2.2.05.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11.946.000,00</b>	-	-	-
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	11.946.000,00	-	-	-
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan PerpustakaanTercetak	11.946.000,00	-	-	-
2.2.05.01.01.00 01.	Belanja Modal Buku Umum	11.946.000,00	-	-	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(12.357.838.520,00)</b>	<b>(10.330.202.160,00)</b>	<b>83,59</b>	<b>(8.783.310.976,00)</b>

Tabel 3.15. Capaian Realisasi Anggaran Indikator

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Pencapaian Realisasi Anggaran (Tabel 4/3*100%)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	10.553.180.640	8.754.170.593	82,95%
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja			
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	1.121.299.264	945.473.911	84,32%
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	<b>683.358.616</b>	<b>630.557.656</b>	92,27%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian setiap indikator kinerja utama.

### 3.4.2. Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi anggaran. Capaian dikatakan **efisien** jika realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi anggaran. Sedangkan **tidak efisien** jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi anggaran.

Tabel 3.16. Efisiensi Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Realisasi Indikator Kinerja (%)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (Tabel 3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	99,69%*	82,95%	9,92%
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	99,38%*		16,43%
3	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	108,17%**	84,32%	23,85%
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	92,27%	7,73%

Ket : \*) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2021. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2022 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB.

\*\*) penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD sementara berdasarkan hasil pengukuran 16 indikator kinerja pemerintah Kota Jambi dari 34 indikator kinerja

Dari hasil analisis efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dapat disimpulkan bahwa capaian Bappeda telah efisien, hal ini dapat dilihat dari dari 2 (dua) indikator kinerja utama Bappeda berada pada capaian yang efisien dengan realisasi kinerja minimal diatas 100%

atau lebih tinggi dari realisasi anggaran, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja utama Bappeda yang berada pada capaian 99,69% dan 99,38% dapat dikatakan efisien karena angka tersebut masih mengacu pada realisasi tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Bappeda Kota Jambi.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Bappeda Kota Jambi pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

#### **A. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**

1. Terdapat 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja tujuan, dimana realisasinya telah mencapai target dan memiliki predikat capaian sangat tinggi.
2. Terdapat 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran; dimana dari 4 indikator kinerja tersebut memiliki predikat capaian sangat tinggi.
3. Terdapat 4 program dengan 4 indikator kinerja program; dimana dari 4 indikator kinerja tersebut memiliki predikat capaian sangat tinggi.

## **B. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja**

Pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Jambi Tahun 2022, dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Bappeda Kota Jambi adalah sebesar Rp 12.357.838.520,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.330.202.160,- (83,59 %). Anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp 11.214.299.209,-, dengan realisasi sebesar Rp 9.436.343.436,- (84,15 %).
2. Belanja Modal sebesar Rp 1.143.539.311,- dengan realisasi sebesar Rp 893.858.724,- (78,17 %).

Dari realisasi anggaran tersebut, utamanya pada belanja operasing, serta dengan mencermati rata-rata capaian dari tujuan dan sasaran (101,81 %), dapat dilihat efisiensi atas penggunaan sumber daya pada Bappeda di tahun 2022, yaitu sebesar 15,3 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Bappeda Kota Jambi pada tahun 2022 sudah cukup efisien.

## **C. Rencana Tindak Lanjut**

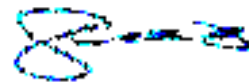
- 1) Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif antara Bappeda dan Perangkat Daerah ampunan dalam mengawal mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan agar target pencapaian sasaran dapat tercapai sesuai target.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrumen yang lebih operasional terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD dan RKPD.
- 3) Perlu dilakukan penyesuaian perubahan kebijakam yang mengacu pada peraturan di atasnya, melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap perubahan kebijakan yang terjadi.



- 4) Sosialisasi peraturan/kebijakan inovasi yang diagendakan secara terjadwal serta melibatkan *stakeholder* terkait .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2022 ini. Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kota Jambi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Jambi, Januari 2022  
Kepala Bappeda Kota Jambi



SUHENDRI, SH, M. Si  
NIP.19700404 199601 1 002